

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup di berbagai dunia semakin kompleks dan penting untuk dibahas dan ditemukan solusinya, hal ini terlihat dari banyaknya masalah lingkungan yang berkembang dan mengancam kehidupan alam serta manusia. Mulai dari isu global seperti perubahan iklim hingga masalah lokal seperti banjir dan sampah, dimana semua permasalahan tersebut menghadirkan ancaman serius. Di Indonesia, masalah sampah menjadi salah satu masalah kompleks. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius dimana permasalahan sampah kini sudah menjadi permasalahan sosial, bukan lagi sekadar permasalahan lingkungan yang bahkan berpotensi terjadinya konflik. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola hidup, dan kebiasaan konsumsi telah menyebabkan peningkatan jumlah dan variasi sampah (Fitri, Ati, & Suyeno, 2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau hasil dari proses alam yang berbentuk padat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber sampah bersumber dari berbagai aktivitas manusia, baik di lingkungan rumah tangga, perkantoran dan sebagainya.

Pertumbuhan populasi menjadi faktor yang memperburuk permasalahan sampah, karena manusia merupakan penyumbang utama sampah. Peningkatan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah semakin bertambah. Masalah ini semakin diperburuk dengan perilaku masyarakat yang terus memandang sampah sebagai hal yang perlu disingkirkan dan dihilangkan. Sampah sering dianggap tidak

bernilai dan hanya mencemari lingkungan, akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang tepat. Oleh sebab itu, kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting untuk mengubah pandangan dan kebiasaan tersebut, sehingga, sampah bisa ditangani dengan lebih baik dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk lingkungan. Menurut informasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) total sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 35,83 juta ton pada tahun 2022. Angka ini menandakan kenaikan sebesar 21,7% dibandingkan tahun 2021, serta merupakan angka tertinggi dalam tahun empat terakhir, dengan jumlah penduduk sekitar 275,77 juta jiwa. Jika jumlah penduduk terus meningkat tanpa adanya pengelolaan sampah yang efektif, volume sampah akan terus meningkat setiap tahunnya. Ironisnya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih minim, sebagaimana terlihat dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tanpa memilahnya terlebih dahulu, bahkan ada yang membuangnya begitu saja di lokasi-lokasi yang tidak semestinya, seperti gorong-gorong, jalan, sungai, atau laut.

Permasalahan sampah bukan hanya menjadi sorotan di tingkat nasional, melainkan di berbagai daerah besar di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah, yang mana provinsi ini tercatat sebagai provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 32.032.400 jiwa pada tahun 2022. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan sampah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan manusia juga semakin beragam, yang pada gilirannya meningkatkan volume dan

variasi sampah (Christina et al., 2015). Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menghasilkan sampah terbanyak di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah menghasilkan sekitar 5,76 juta ton atau sekitar 16,03% dari total sampah nasional. Sampah di provinsi ini berasal dari berbagai aktivitas masyarakat, termasuk industri, rumah tangga, layanan perkotaan, pertanian dan sebagainya.

Gambar 1.1 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia Tahun 2022

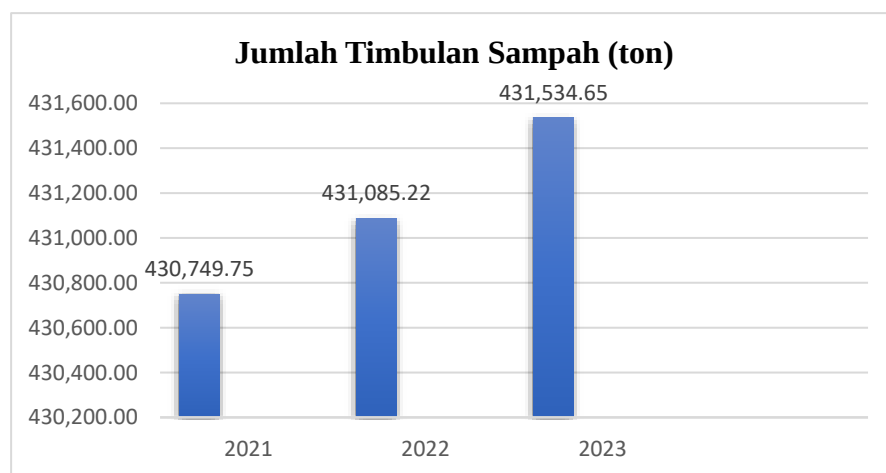


Sumber: katadata.co.id, 2023 (diolah)

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memainkan peran penting sebagai pusat pemerintahan serta lokasi utama untuk berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan bisnis. Hal ini menyebabkan Kota Semarang termasuk ke dalam deretan kota dengan populasi paling padat di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan jumlah penduduk tersebut secara langsung berpengaruh pada meningkatnya timbulan sampah yang diproduksi Kota Semarang. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah sampah yang

dihasilkan Kota Semarang terus meningkat setiap tahun dari 2021 hingga 2023, yang mana Kota Semarang telah menjadi kontributor utama dalam jumlah sampah di Provinsi Jawa sejak 2019 hingga kini. Berikut adalah data timbulan sampah selama tiga tahun terakhir di Kota Semarang.

Gambar 1.2 Data Jumlah Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2021-2023



Sumber: KLHK Republik Indonesia, 2024 (diolah peneliti)

Gambar 1.2 memperlihatkan volume sampah di Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diprediksikan akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah di Kota Semarang semakin serius dan memerlukan penanganan khusus terkait kondisi sampah.

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat merujuk pada bentuk keterlibatan serta kesediaan individu atau kelompok untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan kapasitas dan peran yang mereka miliki. Peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam

menciptakan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, sehingga penting untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran masyarakat, dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu lingkungan rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan terkait pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, masyarakat diberikan kesempatan dan hak yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan, termasuk dalam mengatasi masalah sampah.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat diwujudkan dalam program bank sampah. Bank sampah berfungsi sebagai tempat pengelolaan yang mengadopsi prinsip *3R (reduce, reuse, recycle)*, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, merubah kebiasaan mereka dalam menangani sampah, serta mendukung penerapan ekonomi sirkular. Selain itu, bank sampah berfungsi sebagai strategi sosial untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Aktivitas bank sampah meliputi berbagai langkah, seperti pemisahan sampah di tingkat rumah tangga menurut jenisnya.

Kota Semarang mempunyai 225 bank sampah aktif yang berperan penting dalam pengelolaan sampah (Portal Semarang Satu Data). Dari 225 bank sampah tersebut, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Oktaviana (2022) menunjukkan adanya permasalahan terkait partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di

Semarang masih belum optimal. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang masih rendah.

Bank Resik telah beroperasi sejak Januari 2012 dan hadir sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah sampah yang kian mengkhawatirkan di Kota Semarang, dengan kenaikan sampah tahunan mencapai 10%, sementara luas TPA Jatibarang hanya 4,5 hektar. Tujuan utama didirikannya Bank Sampah Resik Becik ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi, rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Krobokan membuat Bank Sampah Resik Becik belum mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian terdahulu dari Rhenadia Fadhila Rani (2022) menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Krobokan masih kurang peduli terhadap kondisi lingkungan, terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Penumpukan sampah di sekitar rumah warga masih sering terjadi, yang mencerminkan rendahnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kurangnya kepedulian ini turut mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang ada di Bank Sampah Resik Becik, sehingga pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ida Probosari (2020) mengungkapkan bahwa pelaksanaan penanganan sampah belum berjalan maksimal karena keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan sampah masih

terbatas. Sebagian besar masyarakat hanya berpartisipasi dalam menabung sampah tanpa ikut terlibat dalam langkah-langkah penanganan sampah lainnya.

Hasil penelitian dari Ida Probosari (2020) juga menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi masyarakat tidak ikut terlibat dan hanya pengurus Bank Sampah Resik Becik saja. Hal ini menyebabkan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat selama pelaksanaan bank sampah. Kondisi ini tidak sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang diajukan oleh Cohen dan Uphoff (1980), menekankan bahwa tahap evaluasi seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, pengurus bank sampah, dan masyarakat, untuk menilai pelaksanaan program yang telah disusun sebelumnya.

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Resik Becik belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan bank sampah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik, Kelurahan Krobokan Semarang Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penghasil sampah terbesar di Indonesia. (Halaman 3).

2. Timbulan sampah di Kota Semarang terus bertambah setiap tahunnya.
(Halaman 4).
3. Bank Sampah Resik Becik dibentuk guna mengatasi permasalahan sampah, namun partisipasi masyarakat diduga belum optimal karena:
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Krobokan dalam pemilahan dan pengelolaan sampah. (Halaman 6).
 - b. Masyarakat masih kurang begitu memperdulikan kondisi lingkungan.
(Halaman 6).
 - c. Berdasarkan hasil penelitian Ida Probosari (2020) mengenai “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang” oleh Ida Probosari (2020) menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu:
 - Tahap pelaksanaan dalam penanganan sampah masih belum optimal karena sebagian besar masyarakat masih belum berpartisipasi secara aktif dalam penanganan sampah secara keseluruhan (Halaman 7).
 - Tahap evaluasi kurang terbuka karena tidak melibatkan masyarakat, tetapi hanya dilaksanakan oleh pengurus Bank Sampah Resik Becik.
(Halaman 7).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Resik Becik di Kelurahan Krobokan Semarang Barat?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Resik Becik di Kelurahan Krobokan Semarang Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tahapan partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Resik Becik Di Kelurahan Krobokan Semarang Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Resik Becik Di Kelurahan Krobokan Semarang Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian lain dan dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan alat evaluasi dalam merumuskan kebijakan penanganan sampah melalui bank sampah, serta membantu dalam pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan saat ini dan di masa depan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam ilmu dan pengalaman di bidang akademis, serta memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi pembaca lebih banyak pengetahuan dan perspektif serta menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji partisipasi dalam pengelolaan masyarakat sampah.

1.6 Kajian Teori/Konsep

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Jurnal	Metode dan Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Trio Saputra, dkk. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. <i>Jurnal Kebijakan Publik</i> .	Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Partisipasi dikemukakan oleh T. Ndraha terbagi menjadi empat tahap: 1. Pembentukan Keputusan. 2. Pelaksanaan.	Kota Pekanbaru belum mencapai status sebagai kota bebas sampah. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

		3. Pemanfaatan Hasil. 4. Evaluasi	mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
2.	Wahyuni, Dinar. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. <i>Jurnal Masalah-Masalah Sosial</i> .	Penelitian ini memakai metode kualitatif. Partisipasi ini dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977: 8) yang membagi menjadi empat tahap: 1. Pembentukan Keputusan. 2. Pelaksanaan. 3. Pemanfaatan Hasil. 4. Evaluasi	Keterlibatan masyarakat dalam Desa Wisata Pentingsari tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aktivitas wisata. Perencanaan dan pengambilan keputusan hingga sosialisasi bersama pemerintah desa, terlihat dukungan penuh dari masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Selama tahap pelaksanaan, desa wisata ingin menjadi kompetitif di industri pariwisata dengan memberikan kontribusi melalui pemikiran, sumber daya, dan keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas pengembangan. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan wisata, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Tahap evaluasi, masyarakat secara aktif terlibat dalam pertemuan rutin yang melibatkan pihak yang terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode pengelolaan desa wisata untuk kelangsungan hidup.
3.	Rahmi Febrianti, dkk. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Partisipasi menurut Santosa (dalam Sulistiyorini , dkk	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup baik, namun masih belum mencapai potensi penuh. Hal ini terlihat melalui

	Pekanbaru. <i>PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies.</i>	2015) memiliki 3 unsur: 1. Adanya rasa tanggung jawab. 2. Kesiediaan memberi sumbangan untuk mencapai tujuan. 3. Ketersediaan kelompok didalam kelompok.	kegiatan-kegiatan kolektif. Pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam seminggu, baik di pagi maupun siang hari. Kurangnya kepedulian masyarakat dan jarak yang cukup jauh menjadi penyebab yang mempengaruhi keterlibatan warga setempat.
4.	Nurul Safitri, dkk. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. <i>JANE (Jurnal Administrasi Negara).</i>	Penelitian ini memakai metode kualitatif. Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff terbagi menjadi empat tahap: 1. Pengambilan keputusan. 2. Pelaksanaan. 3. Pengambilan manfaat. 4. Evaluasi.	Keterlibatan masyarakat belum mencakup keempat tahapan pengelolaan sampah. Para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat tertentu bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan dan evaluasi, sementara masyarakat umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai tidak langsung atau tidak seimbang.
5.	Dwi Istanto, dkk. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Warga Manglayang RW.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. <i>Social Work Jurnal.</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Partisipasi yang dikemukakan oleh Wilson dan Wilde (2003) , terbagi menjadi 4 dimensi: 1. Pengaruh 2. Inklusivitas 3. Komunikasi 4. kapasitas	Terdapat empat dimensi yang menentukan partisipasi masyarakat, meliputi dimensi Pengaruh, yang tercermin dalam keterlibatan perwakilan anggota dalam pertemuan rutin, serta dimensi Inklusi, yang terlihat dari keterbukaan BSWM dalam menerima anggota komunitas baru. Komunikasi di BSWM berjalan dengan baik, sedangkan dimensi kapasitas meliputi pelatihan yang dirancang

			untuk memperbaiki kualitas sumber daya dan memberi kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi sesuai dengan keahlian dan minat mereka.
6.	Albertin Yesica Stevani Tumimomor & Aldi Herindra Lasso. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Iklim Ngadirejo. <i>Jurnal Pembangunan Masyarakat</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Partisipasi menurut Arnstein Arnstein (1969) dimulai dari jenjang partisipasi tertinggi ke terendah: 1. Manipulasi 2. Terapi 3. Pemberitahuan 4. Konsultasi 5. Penentruman 6. Kemitraan 7. Pendelegasian 8. Kontrol Masyarakat.	Masyarakat menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam pengelolaan sampah. Sekitar 71% anggota masyarakat telah berhenti membuang sampah sembarangan, dan 78% telah berhenti sama sekali. Selain itu, meskipun masyarakat telah aktif mengumpulkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, serta menyetorkan sampah anorganik ke bank sampah, hanya 36% anggota komunitas yang mengolahnya menjadi kompos. Prinsip daur ulang, pengurangan, dan penggunaan kembali juga telah diterapkan di sebagian besar masyarakat.
7.	Laelatul Udhiya, dkk (2024). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa. <i>Communnity Development Journal</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) yang membagi partisipasi menjadi empat: 1. Pengambilan Keputusan. 2. Implementasi. 3. Pengambilan Manfaat. 4. Pemantauan Dan Evaluasi.	Dalam proses sosialisasi dan perencanaan program pemberdayaan pertanian yang dilaksanakan BUMDes, masyarakat Desa Purwasari tidak terlalu terlibat. Mereka juga tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, berbagai hambatan, seperti kekurangan sumber daya manusia yang memadai, kekurangan pelatihan, dan masalah pendanaan, menyebabkan program

			BUMDes belum berjalan dengan baik. Tidak seperti kontribusi ide atau uang, partisipasi masyarakat lebih terlihat dalam bentuk tenaga kerja. Program ini telah menghasilkan manfaat bagi sebagian masyarakat, tetapi kurangnya komitmen setelah pelatihan dan pandangan negatif terhadap profesi pertanian menjadi penghalangnya.
8.	M. Windi Setyo Prayitno, dkk (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. <i>Indonesian Journal of Geography Education</i> .	Penelitian ini memakai metode kualitatif. Partisipasi yang dikemukakan oleh Mikkelsen (1999) terbagi menjadi: 1. Kontribusi sukarela. 2. pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat. 3. Keterlibatan sukarela 4. Partisipasi sebagai suatu proses yang aktif. 5. Pemantapan dialog	Mayoritas masyarakat masih mengelola sampah secara konvensional, dengan hanya membuang atau mengirim sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Namun, beberapa komunitas kecil telah menyadari nilai ekonomi sampah dan mulai memilahnya secara mandiri dan sederhana.. Selain itu, beberapa komunitas menerapkan pengelolaan sampah terpadu dengan mendirikan bank sampah dan tempat pengomposan.
9.	Ridha Hastika & Hasan Ismail (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Di Kelurahan Kedung Baruk. <i>Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa</i> .	Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif Partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropoerto dalam Davis (2015) membagi jenis partisipasi menjadi: 1. Pikiran. 2. Tenaga. 3. Keahlian. 4. Barang. 5. Uang.	Karena kurangnya fasilitas untuk pengelolaan sampah, pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum sepenuhnya berjalan. Meskipun demikian, masyarakat telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga lingkungan bersih dengan mengikuti kerja bakti menjelang hari besar,

			mengumpulkan iuran kampung, dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sebagai hasil dari penelitian, setiap rumah setiap rumah mempunyai tempat pembuangan sampah pribadi. Sampah yang dibungkus dalam kantong plastik dibuang ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Namun, pemilahan sampah belum diterapkan, karena masyarakat sudah terbiasa memiliki tempat sampah di setiap rumah tanpa membedakan antara sampah basah dan kering.
10.	Bella Isnainia R.F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Kota Surabaya). <i>Jurnal Aplikasi Administrasi</i>.	Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif. Partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi menjadi empat: 1. Pengambilan keputusan. 2. Pelaksanaan. 3. Pengambilan kemanfaatan. 4. Evaluasi.	Masyarakat setempat telah memahami pentingnya memilah sebelum membawanya ke Bank Sampah Rukun Jaya, serta mengumpulkan dan menimbangnya di bank sampah tersebut, berkat sosialisasi yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam menilai program masih kurang. Ini adalah hasil dari kurangnya evaluasi program bank sampah dari tahun 2012 hingga 2018. Namun, masih ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi karena pembukuan hasil penjualan sampah dan simpanan dievaluasi secara teratur pada setiap pertemuan PKK.
11.	Nofita Bobsuni & Muhammad Farid	Penelitian ini memakai	Keterlibatan warga dilakukan melalui

	Ma'ruf. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. <i>Publika</i>.	metode penelitian deskriptif. Partisipasi ini dikemukakan oleh Hamijoyo dan Iskandar dalam (Huraerah 2008) membagi partisipasi: 1. Buah pikiran. 2. Tenaga. 3. Harta benda. 4. Keterampilan dan kemahiran. 5. Sosial.	berbagai cara. Pertama, pertemuan bulanan yang rutin menunjukkan keterlibatan masyarakat. Di sana, gagasan warga dibahas mulai dari perencanaan hingga evaluasi, termasuk masalah pendanaan dan pengelolaan lahan. Kedua, warga berpartisipasi dalam kerja fisik bersama untuk mengubah bekas tambang kapur menjadi tempat wisata yang menarik. Ketiga, untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan berdampak positif bagi masyarakat, wadah Taplus Invest mengelola patungan tanpa bantuan eksternal untuk menunjukkan partisipasi harta benda. Keempat, terlihat bahwa keterampilan dan kemahiran terlibat dalam perencanaan dan pembangunan wisata yang terencana dan artistik. Terakhir, melalui rasa kebersamaan dan keharmonisan dalam setiap kegiatan, partisipasi sosial meningkat, meningkatkan semangat masyarakat untuk mengelola Wisata Alam Setigi. Kombinasi berbagai bentuk partisipasi ini menghasilkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan yang menguntungkan seluruh warga Desa Sekapuk.
--	---	--	--

12.	Khairu Syifa Ahyani, dkk. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. <i>Jurnal Inovasi Penelitian</i> .	Penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Partisipasi yang dikemukakan oleh Yadav dalam Theresia (2014:198–200), terbagi menjadi: 1. Pengambilan keputusan. 2. Pelaksanaan kegiatan. 3. Pemantauan dan evaluasi. 4. Pemanfaatan hasil.	Di berbagai aspek, keterlibatan warga telah berjalan dengan baik. Warga setempat berpartisipasi. Ketika proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi dari tingkat RT hingga musyawarah desa. Meskipun partisipasi warga belum sepenuhnya terbukti, partisipasi dalam kegiatan cukup besar. Ini terlihat dari kontribusi ide, tenaga, dan bentuk swadaya lainnya dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, masyarakat memiliki akses yang baik ke informasi tentang setiap lokasi pembangunan yang sedang berlangsung, dan informasi ini juga disebarkan melalui media sosial. Dalam hal pemanfaatan hasil, fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan oleh masyarakat umum berkat inisiatif kolaboratif pemerintah desa dan masyarakat untuk pemeliharaan rutin, yang dilakukan melalui grup "Saba Warga" untuk pelaporan.
13.	Randy Vallentino Neonbeni, dkk. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Letmaffo Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utar.	Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Partisipasi menurut Davis dalam Sastropetro, (1988) terbagi menjadi: 1. Pikiran. 2. Tenaga. 3. Keahlian. 4. Barang.	Di Desa Letmaffo, proses pembangunan terhambat oleh berbagai masalah terkait keterlibatan masyarakat. Kurangnya keterlibatan mereka dalam kegiatan Musrembang dan RPJMDes menyebabkan

	<i>Jurnal Ilmiah Indonesia.</i>	5. Uang.	aspirasi masyarakat tidak dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, tenaga kerja kurang terlibat dalam kontribusi masyarakat melalui kegiatan kerja bakti karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan warga. Namun, partisipasi yang didasarkan pada keahlian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung apatis akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran, sehingga banyak individu lebih fokus pada urusan pribadi mereka. Meskipun demikian, partisipasi mulai terlihat dalam bentuk barang, seperti meminjam alat atau perkakas meskipun kualitasnya masih rendah. Karena partisipasi finansial masyarakat tidak dapat memberikan kontribusi langsung dalam bentuk uang tunai, mereka hanya dapat memberikan makanan sederhana bagi para pekerja untuk mendukung pembangunan.
14.	Muhammad Rivaldy Anshory, dkk. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong. <i>Jurnal Ilmu Sosial Mahakam</i>.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan model penelitian asosiatif. Partisipasi ini dikemukakan Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979) membagi partisipasi menjadi empat tahap : 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Menikmati hasil. 4. Evaluasi.	regresi yang dilakukan, diperoleh adanya hubungan positif antara variabel independen dan dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung melebihi t tabel, yang mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah.

15.	Nuraisah & Lilis Wahyuni. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kampung Rawa Mekar Jaya. <i>Social Work Jurnal</i>.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Partisipasi ini dikemukakan Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2015:61) terbagi menjadi empat, yaitu: 1. Pengambilan keputusan. 2. Pelaksanaan. 3. Pengambilan pemanfaatan. 4. Evaluasi.	Di Kampung Rawa Mekar Jaya, saat masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove, tidak ada inisiatif yang muncul untuk enginisiasi kegiatan. Namun, seorang pemuda yang berperan sebagai agen perubahan berhasil menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap mangrove dengan memelihara dan menanam. Hanya sebagian kecil warga yang berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan kawasan mangrove dan jalan menuju mangrove selama pembangunan ekowisata. Beberapa masyarakat juga membantu dalam pembangunan fasilitas seperti tempat duduk di sepanjang kawasan mangrove. Meskipun demikian, potensi mangrove di Kampung Rawa Mekar Jaya belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak tantangan yang menghadang dalam pengelolaan dan pengembangannya. Kendala utama yang dihadapi adalah masyarakat tidak memahami bagaimana memanfaatkan potensi ekowisata mangrove yang ada.
-----	---	--	--

Trio Saputra, dkk. (2022) dalam penelitiannya menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. Metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru belum mencapai status sebagai kota bebas sampah. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Wahyuni dan Dinar (2019) menganalisis pengembangan Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman dari sudut pandang partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pentingsari tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aktivitas wisata. Perencanaan dan pengambilan keputusan hingga sosialisasi bersama pemerintah desa, terlihat dukungan penuh dari masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Selama tahap pelaksanaan, desa wisata ingin menjadi kompetitif di industri pariwisata dengan memberikan kontribusi melalui pemikiran, sumber daya, dan keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas pengembangan. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan wisata, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Tahap evaluasi, masyarakat secara aktif terlibat dalam pertemuan rutin yang melibatkan pihak yang terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode pengelolaan desa wisata untuk kelangsungan hidup.

Penelitian lainnya ditulis oleh Rahmi Febrianti, dkk. (2022) menganalisis tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup baik, namun masih belum mencapai potensi penuh. Hal ini terlihat melalui kegiatan-kegiatan kolektif. Pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam seminggu, baik di pagi maupun siang hari. Kurangnya kepedulian masyarakat dan jarak yang cukup jauh menjadi penyebab yang mempengaruhi keterlibatan warga setempat.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Nurul Safitri dan tim (2022) menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan keterlibatan masyarakat belum mencakup keempat tahapan pengelolaan sampah. Para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat tertentu bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan dan evaluasi, sementara masyarakat umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai tidak langsung atau tidak seimbang.

Penelitian lainnya juga oleh dilakukan Dwi Istanto, dkk. (2021) menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Wargi Manglayang RW.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Metode yang digunakan, adalah pendekatan kualitatif. Temuan penelitian

mengungkapkan terdapat memiliki empat dimensi yang menentukan partisipasi masyarakat, meliputi dimensi Pengaruh, yang tercermin dalam keterlibatan perwakilan anggota dalam pertemuan rutin, serta dimensi Inklusi, yang terlihat dari keterbukaan BSWM dalam menerima anggota komunitas baru. Komunikasi di BSWM berjalan dengan baik, sedangkan dimensi kapasitas meliputi pelatihan yang dirancang untuk memperbaiki kualitas sumber daya dan memberi kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi sesuai dengan keahlian dan minat mereka.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Albertin Yesica Stevani Tumimomor & Aldi Herindra Lasso (2024), menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Iklim Ngadirejo. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Temuan penelitian mengungkapkan masyarakat memperlihatkan keterlibatan yang tinggi dalam pengelolaan sampah. Sekitar 71% anggota masyarakat telah berhenti membuang sampah sembarangan, dan 78% telah berhenti sama sekali. Selain itu, meskipun masyarakat telah aktif mengumpulkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, serta menyetorkan sampah anorganik ke bank sampah, hanya 36% anggota komunitas yang mengolahnya menjadi kompos. Prinsip daur ulang, pengurangan, dan penggunaan kembali juga telah diterapkan di sebagian besar masyarakat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Laelatul Udhiya, dkk (2024) menganalisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan adalah

metode kuantitatif. Temuan penelitian mengungkapkan dalam proses sosialisasi dan perencanaan program pemberdayaan pertanian yang dilaksanakan BUMDes, masyarakat Desa Purwasari tidak terlalu terlibat. Mereka juga tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, berbagai hambatan, seperti kekurangan sumber daya manusia yang memadai, kekurangan pelatihan, dan masalah pendanaan, menyebabkan program BUMDes belum berjalan dengan baik. Tidak seperti kontribusi ide atau uang, partisipasi masyarakat lebih terlihat dalam bentuk tenaga kerja. Program ini telah menghasilkan manfaat bagi sebagian masyarakat, tetapi kurangnya komitmen setelah pelatihan dan pandangan negatif terhadap profesi pertanian menjadi penghalangnya.

Penelitian lainnya ditulis oleh M. Windi Setyo Prayitno, dkk (2020) menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan mayoritas masyarakat masih mengelola sampah secara konvensional, dengan hanya membuang atau mengirim sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Namun, beberapa komunitas kecil telah menyadari nilai ekonomi sampah dan mulai memilahnya secara mandiri dan sederhana. Selain itu, beberapa komunitas menerapkan pengelolaan sampah terpadu dengan mendirikan bank sampah dan tempat pengomposan.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Ridha Hastika & Hasan Ismail (2023) menganalisis Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pengelolaan

Sampah Dalam Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Di Kelurahan Kedung Baruk. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Temuan penelitian mengungkapkan karena kurangnya untuk pengelolaan sampah, pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum sepenuhnya berjalan. Meskipun demikian, masyarakat telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga lingkungan bersih dengan mengikuti kerja bakti menjelang hari besar, mengumpulkan iuran kampung, dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sebagai hasil dari penelitian, setiap rumah setiap rumah memiliki tempat pembuangan sampah pribadi. Sampah yang dibungkus dalam kantong plastik dibuang ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Namun, pemilahan sampah belum diterapkan, karena masyarakat sudah terbiasa memiliki tempat sampah di setiap rumah tanpa membedakan antara sampah basah dan kering.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Bella Isnainia R.F. (2020) menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Kota Surabaya). Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan masyarakat setempat telah memahami pentingnya memilah sebelum membawanya ke Bank Sampah Rukun Jaya, serta mengumpulkan dan menimbanginya di bank sampah tersebut, berkat sosialisasi yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam menilai program masih kurang. Ini adalah hasil dari kurangnya evaluasi program bank sampah dari tahun 2012 hingga 2018. Namun, masih ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi karena

pembukuan hasil penjualan sampah dan simpanan dievaluasi secara teratur pada setiap pertemuan PKK.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nofita Bobsuni & Muhammad Farid Ma'ruf (2021) menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan yaitu deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan keterlibatan warga dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, pertemuan bulanan yang rutin menunjukkan keterlibatan masyarakat. Di sana, gagasan warga dibahas mulai dari perencanaan hingga evaluasi, termasuk masalah pendanaan dan pengelolaan lahan. Kedua, warga berpartisipasi dalam kerja fisik bersama untuk mengubah bekas tambang kapur menjadi tempat wisata yang menarik. Ketiga, untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan berdampak positif bagi masyarakat, wadah Taplus Invest mengelola patungan tanpa bantuan eksternal untuk menunjukkan partisipasi harta benda. Keempat, terlihat bahwa keterampilan dan kemahiran terlibat dalam perencanaan dan pembangunan wisata yang terencana dan artistik. Terakhir, melalui rasa kebersamaan dan keharmonisan dalam setiap kegiatan, partisipasi sosial meningkat, meningkatkan semangat masyarakat untuk mengelola Wisata Alam Setigi. Kombinasi berbagai bentuk partisipasi ini menghasilkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan yang menguntungkan seluruh warga Desa Sekapuk.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Khairu Syifa Ahyani dan tim (2022) menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan di berbagai aspek, keterlibatan warga telah berjalan dengan baik. Warga setempat berpartisipasi ketika proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi dari tingkat RT hingga musyawarah desa. Meskipun partisipasi warga belum sepenuhnya terbukti, partisipasi dalam kegiatan cukup besar. Ini terlihat dari kontribusi ide, tenaga, dan bentuk swadaya lainnya dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, masyarakat memiliki akses yang baik ke informasi tentang setiap lokasi pembangunan yang sedang berlangsung, dan informasi ini juga disebarluaskan melalui media sosial. Dalam hal pemanfaatan hasil, fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan oleh masyarakat umum berkat inisiatif kolaboratif pemerintah desa dan masyarakat untuk pemeliharaan rutin, yang dilakukan melalui grup “Saba Warga” untuk pelaporan.

Penelitian lainnya juga dilakukan Randy Vallentino Neonbeni, dkk (2022) menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Letmaffo Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan di Desa Letmaffo, proses pembangunan terhambat oleh berbagai masalah terkait keterlibatan masyarakat. Kurangnya keterlibatan mereka dalam kegiatan Musrembang dan RPJMDes menyebabkan aspirasi masyarakat tidak

dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, tenaga kerja kurang terlibat dalam kontribusi masyarakat melalui kegiatan kerja bakti karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan warga. Namun, partisipasi yang didasarkan pada keahlian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung apatis akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran, sehingga banyak individu lebih fokus pada urusan pribadi mereka. Meskipun demikian, partisipasi mulai terlihat dalam bentuk barang, seperti meminjam alat atau perkakas meskipun kualitasnya masih rendah. Karena partisipasi finansial masyarakat tidak dapat memberikan kontribusi langsung dalam bentuk uang tunai, mereka hanya dapat memberikan makanan sederhana bagi para pekerja untuk mendukung pembangunan.

Penelitian lainnya juga dilakukan Muhammad Rivaldy Anshory, dkk (2020) menganalisis tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Baru Kecamatan Tenggara. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Temuan penelitian mengungkapkan regresi yang dilakukan, diperoleh adanya hubungan positif antara variabel independen dan dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung melebihi t tabel, yang mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nuraisah & Lilis Wahyuni (2020) menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kampung Rawa Mekar Jaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan di

Kampung Rawa Mekar Jaya, saat masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove, tidak ada inisiatif yang muncul untuk menginisiasi kegiatan. Namun, seorang pemuda yang berperan sebagai agen perubahan berhasil menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap mangrove dengan memelihara dan menanam. Hanya sebagian kecil warga yang berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan kawasan mangrove dan jalan menuju mangrove selama pembangunan ekowisata. Beberapa masyarakat juga membantu dalam pembangunan fasilitas seperti tempat duduk di sepanjang kawasan mangrove. Meskipun demikian, potensi mangrove di Kampung Rawa Mekar Jaya belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak tantangan yang menghadang dalam pengelolaan dan pengembangannya. Kendala utama yang dihadapi adalah masyarakat tidak memahami bagaimana memanfaatkan potensi ekowisata mangrove yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Trio Saputra, dkk. (2022), yaitu menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. Namun perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah penelitian akan lebih di fokuskan untuk membahas tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah resik becik di Kelurahan Krobokan Semarang Barat yang menurut penelusuran peneliti belum ada yang secara spesifik mengulas tentang tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lokasi

tersebut. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan istilah dari “administrasi” dan “publik”. “Administrasi” merujuk pada kolaborasi antara dua individu atau lebih dengan tujuan tertentu yang rasional. Di sisi lain, istilah “publik,” mengacu pada orang-orang, seluruh anggota suatu komunitas, masyarakat, dan sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama. Administrasi publik didefinisikan oleh Keban (2008) sebagai suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola keputusan terkait kebijakan publik.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Widanti, 2022:25), mengartikan publik sebagai proses penggabungan sumber daya untuk merancang, melaksanakan dan mengelola keputusan kebijakan publik. Pasolong (dalam Widanti, 2022:24), administrasi publik diartikan sebagai kolaborasi antara sejumlah individu atau lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Hughes (dalam Widanti, 2022:25), administrasi publik didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kebijakan oleh pejabat publik yang diperoleh dari pihak lain. Administrasi publik memiliki karakteristik yang membedakannya dari administrasi swasta, meskipun ada beberapa prinsip yang serupa (Keban dalam Widanti, 2022). Perbedaan utama terdapat pada pihak yang dilayani, yaitu

pemerintah fokus pada pelayanan kepentingan publik, sedangkan sektor swasta lebih mengutamakan kepentingan individu atau bisnis. Perbedaan tersebut seringkali menyebabkan perselisihan konflik, karena pemerintah mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan sektor swasta, dan sebaliknya.

Perlu diakui bahwa cakupan administrasi publik sangat luas dan dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika permasalahannya. Salah satu pendekatan untuk memahami materi atau ruang lingkup administrasi publik adalah dengan mengidentifikasi berbagai jenis lembaga negara dan non-departemen. Tugas dan tanggung jawab pemerintah atau administrasi publik semakin kompleks seiring dengan rumitnya kehidupan manusia (Chandler dan Plano dalam Widanti, 2022:14).

Ruang lingkup administrasi publik yang dinamis dapat dipahami melalui berbagai literatur, terutama buku-buku teks administrasi publik. Buku-buku teks tersebut mencakup bidang dan isu yang relevan saat ini dan penting untuk diperhatikan baik oleh praktisi administrasi publik maupun akademisi. Beberapa buku teks terkenal memberikan pandangan mengenai beberapa aspek ruang lingkup ini, salah satunya adalah karya Nicholas Henry (dalam Widanti, 2022:14), yang membahas beberapa elemen penting dalam ranah administrasi publik, di antaranya:

- a. Organisasi Publik yang mengulas model organisasi dan peran birokrasi.
- b. Manajemen Publik, berfokus pada teori, sistem manajemen, evaluasi program dan hasil kerja, anggaran publik, serta manajemen SDM.

- c. Implementasi meliputi langkah-langkah dalam menerapkan kebijakan publik, privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika birokrasi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Sebagaimana dinyatakan oleh Nicolas Henry dalam Astuti et al. (2020), pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik mencakup sejumlah tahapan di antaranya:

1. Paradigma Awal Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma awal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik dengan membedakan aspek administratif dan politik pemerintahan. Beberapa prinsip penting pada tahap ini melibatkan pemisahan yang jelas antara politik dan administrasi, membandingkan organisasi sektor publik dengan praktik sektor swasta, meningkatkan efisiensi dengan menerapkan metode yang mirip dengan bisnis, serta fokus pada manajemen dan pelatihan pegawai negeri untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pendekatan ilmiah juga ditekankan dengan membedakan antara nilai dan fakta. Dengan memisahkan nilai dari fakta, paradigma ini juga mengedepankan pendekatan ilmiah Astuti et al. (2020).

2. Paradigma Kedua Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua memfokuskan pada pengenalan prinsip-prinsip administrasi publik. Buku “Prinsip-prinsip Administrasi Publik”

yang ditulis oleh W.F. Willoughby pada tahun 1927 memberikan dasar untuk administrasi publik. Tujuh prinsip yang tercantum dalam buku "*Papers on the Science of Administration*" yang ditulis oleh Luther H. G. dan Lyndall F. pada tahun 1937 adalah salah satu prinsip administrasi publik yang paling terkenal dan diakui. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pengarahan, pengadaan sumber daya manusia, penganggaran dan pelaporan. Paradigma ini menekankan prinsip-prinsip administrasi yang dianggap dapat berlaku dalam konteks organisasi dan sosial budaya Astuti et al. (2020).

3. Paradigma Ketiga Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam tahap ketiga, administrasi publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Terdapat perbedaan pandangan antara para ilmuwan manajemen yang menganggap administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen, dan ilmuwan politik yang berupaya untuk mengembalikannya ke dalam ranah ilmu politik. Tujuan dari paradigma ini pada saat itu adalah untuk menciptakan hubungan konseptual antara administrasi publik dan disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, sebagai reaksi terhadap perubahan dan kebangkitan bidang ini, administrasi publik kembali berhubungan dengan akarnya, yaitu ilmu politik Astuti et al. (2020).

4. Paradigma Keempat Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Henry memperkenalkan paradigma baru yang disebut sebagai “administrasi publik sebagai manajemen”. Dalam paradigma ini, administrasi publik dianggap sebagai bagian dari manajemen. Hal ini menandai masa ketika para ahli manajemen berhasil mendukung penerapan administrasi publik dalam ilmu manajemen. Paradigma ketiga dan keempat melibatkan persaingan antara dua disiplin ilmu utama, yaitu manajemen dan politik, untuk menentukan siapa yang memiliki klaim yang paling kuat tentang domain ilmu administrasi publik. Astuti et al. (2020).

5. Paradigma Kelima Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Paradigma ini dikenal sebagai “*public administration as public administration*,” dimana periode ini, administrasi publik diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Perhatian utama tertuju pada pergeseran model administrasi publik konvensional ke model New Public Management (NPM). Hendry menganggap tahapan ini sebagai yang paling penting dari semua tahapan perkembangan administrasi publik. Perubahan pada tahap ini sangatlah jelas dan terlihat. NPM juga menghadapi tantangan, termasuk ketidakefisienan dalam sistem administrasi, yang muncul dari gabungan teori ekonomi dan metode manajerial yang diterapkan di

sektor swasta. Paradigma NPM mencerminkan peralihan menuju penggunaan prinsip-prinsip sektor swasta dalam administrasi publik, yang dikenal sebagai konsep “*governance*” Astuti et al. (2020).

6. Paradigma Keenam Governance (1990-sekarang)

Konsep governance mencerminkan fundamental perbedaan antara pemerintahan modern dan pemerintahan tradisional. Dalam paradigma governance, sektor-sektor lain memiliki peran penting dalam penyediaan layanan, sedangkan peran pemerintah lebih berfokus pada regulasi dan pengawasan. Di samping itu, governance juga mencakup kolaborasi antara berbagai pihak dalam melaksanakan fungsi pemerintahan (Astuti et al., 2020).

Dari keenam pergeseran paradigma diatas, penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Resik Becik di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat, ini masuk kedalam paradigma Governance. Dalam konteks Bank Sampah Resik Becik, warga setempat secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah di sumbernya hingga pengumpulan dan pengolahan sampah di bank sampah. Keterlibatan masyarakat ini mencerminkan prinsip-prinsip governance yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik merupakan hasil

kerjasama yang melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah atau pihak tertentu. Dimana inisiatif ini dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi masalah dalam program pengelolaan sampah di daerah tersebut.

1.6.4 Manajemen Publik

Konsep manajemen publik pada dasarnya merupakan kajian yang dibentuk oleh beragam disiplin ilmu. Artinya, keilmuan manajemen publik didukung oleh berbagai bidang seperti ilmu manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu politik. Kombinasi dari berbagai disiplin inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kajian manajemen publik. Dalam konteks ini, menurut pandangan Overman yang dikutip oleh Widanti (2023:14) menegaskan bahwa manajemen publik bukanlah “manajemen ilmiah”, meskipun konsep tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Manajemen publik juga tidak hanya sekadar analisis kebijakan atau administrasi publik, tetapi mencerminkan perpaduan antara orientasi instrumen rasional di satu sisi dan orientasi kebijakan politik di sisi lainnya. Manajemen publik dapat dipahami sebagai kajian interdisipliner yang mencakup semua aspek organisasi dan menggabungkan tugas-tugas manajemen.

Menurut Sharfritz dan Russel dalam Keban (2014: 92), manajemen diartikan sebagai proses yang melibatkan individu yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi dengan memanfaatkan mesin dan tenaga

manusia untuk meraih sasaran. Suradinata dalam Anggara (2016:553) mengatakan manajemen publik terdiri dari serangkaian aktivitas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, manajemen publik dapat dianggap sebagai manajemen pemerintah, karena pemerintah melakukan upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan infrastruktur yang tersedia. Sedangkan Pasolong dalam Widanti (2023:14) mendefinisikan manajemen publik sebagai “pengelolaan instansi pemerintah”. Meskipun definisi ini sangat umum, esensinya terletak pada bagaimana upaya untuk mengelola sebuah institusi pemerintah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen publik mengacu pada pengelolaan berbagai sektor publik oleh lembaga pemerintah, yang meliputi pengelolaan kegiatan, pengaturan alokasi sumber daya, pengawasan, serta penentuan arah kebijakan, untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.6.5 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat terjadi ketika komunitas mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan sosial guna meningkatkan kondisi mereka sendiri. Keberhasilan proses pemberdayaan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, inti dari pemberdayaan mencakup proses pembangunan, langkah yang diambil oleh masyarakat dan usaha untuk

meningkatkan kondisi diri sendiri. Oleh karena itu, efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada pelaksana, tetapi juga pada seberapa aktif masyarakat yang diberdayakan berpartisipasi dalam usaha untuk meningkatkan kondisi mereka (Maryani, 2019: 8).

Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi yang bertujuan guna meningkatkan potensi masyarakat dengan cara pembelajaran kolaboratif. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat mendorong semua pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk mengubah perilaku mereka, sehingga kehidupan menjadi lebih berdaya, mandiri, dan berpartisipasi secara berkelanjutan (Mardikanto dalam Anggraini, 2019). Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menyiapkan dan mengoptimalkan kemampuan masyarakat, sekaligus mengembangkan kelembagaan yang ada, agar masyarakat dapat meraih kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi dalam Anggraini, 2019).

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari berbagai tahapan, seperti yang dinyatakan oleh Wrihatnolo dan Riant Nugroho dalam Anggraini (2019):

1. Tahap Penyadaran

Dalam tahap kesadaran, masyarakat belajar tentang hak untuk menjadi mandiri dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Umumnya tahap ini dilaksanakan dengan dukungan pembinaan.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tujuan dari tahapan ini ialah membantu komunitas yang tidak beruntung agar memperoleh keahlian yang dibutuhkan guna memanfaatkan potensi yang ada. Hal ini dilakukan melalui rangkaian latihan dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan hidup.

3. Tahap Pendayaan

Di tahap pendayaan, masyarakat mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar berdasarkan dengan keahlian mereka serta diberi ruang untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui partisipasi yang aktif dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat diajarkan untuk melakukan evaluasi diri terhadap konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

1.6.6 Partisipasi Masyarakat

Menurut Tawai (2017), partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dari pemberdayaan masyarakat karena merujuk pada keikutsertaan dan kolaborasi masyarakat, baik secara perseorangan maupun dalam komunitas atau organisasi, yang didasari oleh kepedulian individu secara sukarela, baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan wujud dari pemberdayaan yang menerapkan pendekatan *bottom-up*, yang sering dikenal sebagai

pendekatan partisipatif (Riyadi et al., 2022). Pendekatan partisipatif ini memungkinkan pergeseran kegiatan masyarakat dari pendekatan *top down* menjadi *bottom up* (Bahri, 2019).

Pidarta dalam Hutagalung (2022:9), mendefinisikan partisipasi sebagai pelibatan satu atau lebih individu dalam suatu aktivitas. Hal ini mencakup keterlibatan mental, emosional, dan fisik, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan dan bertanggung jawab atas peran yang diambil. Menurut Tjokroamidjojo dalam Hutagalung (2022:10), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam menentukan tujuan, rancana dan kebijakan pemerintah, serta berkontribusi dalam menanggung tanggung jawab dan menikmati hasil atau manfaat dari proses pembangunan.

Cohen dan Uphoff dalam Hutagalung (2022:10) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, penerimaan manfaat, serta evaluasi. Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa wadah partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mitra bagi Pemerintah Desa. Wadah tersebut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di tingkat Desa.

Cohen dan Uphoff dalam Hutagalung (2022:12) menjelaskan partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi empat, diantaranya:

1. Tahap Pengambilan Keputusan

Tahap ini melibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan alternatif yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Partisipasi dalam proses ini dapat terlihat melalui kontribusi pemikiran, kehadiran dalam pertemuan, diskusi, serta memberikan tanggapan atau menolak program yang diajukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan berfokus pada berbagai elemen yang terlibat dalam menjalankan program, termasuk kontribusi dari masyarakat/sumber daya seperti dana, tenaga, dan fasilitas, serta aksi yang diambil oleh masyarakat. Semua ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program yang sedang dijalankan.

3. Tahap Pemanfaatan Hasil

Kualitas dan kuantitas pencapaian program berhubungan dengan tahap pemanfaatan hasil. Dari sudut pandang kualitas, keberhasilan program ditunjukkan oleh peningkatan hasil yang lebih baik, sementara dari segi kuantitas, keberhasilan diukur berdasarkan persentase pencapaian program terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur partisipasi dalam

pemanfaatan hasil dapat dilihat melalui keuntungan materi, sosial, atau pribadi yang dirasakan oleh masyarakat.

4. Tahap Evaluasi

Salah satu tujuan dari tahap ini ialah untuk mengetahui seberapa baik program yang direncanakan telah dilaksanakan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang dirancang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek evaluasi sangat penting karena partisipasi masyarakat berfungsi sebagai umpan balik, berupa kritik atau saran, yang dapat digunakan untuk memperbaiki program atau kegiatan di masa mendatang.

Arnstein (dalam Kiki, 2022:37) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Non-Participation

Pada tingkat partisipasi yang terendah, yang disebut non-partisipasi, terdapat dua tingkat, yaitu manipulasi dan terapi. Pada tahap ini, pihak berwenang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Mereka hanya memanfaatkan partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk mendidik dan memenuhi kebutuhan partisipan. Pada level ini, terjadi penyimpangan informasi yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan data yang akurat dan transparan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, partisipasi yang

terjadi tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

2. Tokenism

Pada tingkat ini, partisipasi masyarakat tampak melalui kegiatan dialog publik, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka, walaupun tidak ikut serta langsung dalam keputusan yang diambil. Pada tingkat ini, terdapat tiga tingkat komunikasi pemberitahuan, konsultasi, dan penetraman. Pada tingkat pemberitahuan, komunikasi dari pihak berwenang kepada masyarakat bersifat satu arah, seperti pengumuman, sosialisasi, penyebaran pamflet, atau laporan tahunan. Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat masih tergolong sangat rendah. Tingkatan konsultasi yang mencerminkan adanya komunikasi dua arah, contohnya melalui survei opini masyarakat, pertemuan komunitas, dan sesi dengar pendapat publik. Sementara itu, tingkatan penetraman menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih signifikan, dimana mereka dilibatkan dalam komite yang bertugas merumuskan kebijakan. Meskipun demikian, pihak yang memegang kekuasaan tetap memiliki kekuatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

3. *Citizen Power*

Dalam tingkat tertinggi yang disebut “*citizen power*” terdapat tiga tahapan, yaitu kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Pada tahap kemitraan, mekanisme partisipasi lebih jelas terlihat karena adanya redistribusi kekuasaan melalui negosiasi antara pihak berkuasa dan masyarakat untuk membuat keputusan bersama. Tahap pendelegasian kekuasaan menunjukkan adanya penyerahan sebagian wewenang dari pihak berwenang kepada masyarakat. Sementara itu, tahap kontrol masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan atau kebijakan tertentu. Inilah tingkatan partisipasi menurut Arnstein.

Oakley dalam Dirawan (2024:32) menjelaskan bahwa tahapan partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan tiga indikator, yaitu kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup peran, aksi dan tanggung jawab.

1. Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat melalui pemikiran, dana, tenaga, dan sarana untuk mendukung program atau kegiatan yang dijalankan oleh pihak tertentu.

2. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah proses yang melibatkan pembagian tugas atau pembentukan struktur organisasi dengan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, dan lingkungan yang diperlukan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mencakup peran, aksi, dan tanggung jawab.

a. Peran

Peran masyarakat merujuk pada kontribusi dan keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, atau kegiatan lainnya melibatkan masyarakat. Hal ini mencakup kontribusi dalam bentuk pemikiran, aksi, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama serta memajukan kesejahteraan bersama.

b. Aksi

Aksi masyarakat mencakup tindakan nyata atau kontribusi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melibatkan diri dalam berbagai kegiatan atau proses yang berdampak kehidupan mereka. Aksi masyarakat merupakan bentuk konkret dari partisipasi yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat berupa peran aktif dalam pengambilan keputusan,

implementasi program, atau berkontribusi secara positif terhadap perkembangan masyarakat.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab masyarakat merujuk pada perilaku melaksanakan suatu hal secara dengan tekun dan sanggup menanggung kemungkinan risiko yang terjadi ketika terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program, pengambilan keputusan, atau kegiatan lainnya yang mendorong atau menghambat kehidupan masyarakat. Ini mencakup kesadaran akan kepentingan bersama, kontribusi positif, dan dukungan terhadap upaya bersama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

1.6.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam Tahapan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Resik Becik Di Kelurahan Krobokan Semarang Barat

Dalam sebuah kegiatan, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat yang mana faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal dalam mendukung keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut Yulianti dalam Rasyid (2020), menguraikan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

a. Pengetahuan dan Keahlian

Pengetahuan dan keahlian masyarakat menjadi landasan utama yang memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Dengan pemahaman dan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat memahami berbagai tahapan dalam suatu program, sehingga mereka dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif.

b. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat memengaruhi sudut pandang kelompok kerja tertentu. Hal ini menjadi faktor mendasar yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam suatu program, karena setiap kelompok memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki peran penting dan berpengaruh besar terhadap keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, karena hal ini memengaruhi cara pandang mereka dalam menilai dan memahami program yang akan dilaksanakan.

d. Jenis Kelamin

Jenis kelamin menjadi salah satu faktor mendasar dalam partisipasi suatu program, karena keinginan atau kemampuan masyarakat untuk terlibat seringkali dipengaruhi oleh jenis kelamin. Hal ini dapat menciptakan perbedaan persepsi terhadap suatu isu.

e. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu

Kepercayaan terhadap budaya tertentu dapat memengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu program. Norma-norma dan budaya yang mengakar dalam suatu komunitas menjadi dasar yang membentuk cara pandang mereka terhadap program yang ditawarkan.

Menurut Markandito dalam Anis (2024)), menguraikan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu;

1. Kesempatan

Kesempatan mengacu pada situasi atau kondisi lingkungan yang memungkinkan seseorang menyadari peluang untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Salah satu bentuk untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar terlibat adalah melalui dukungan dan peran aktif dari pemerintah.

2. Kemampuan

Kemampuan disini diartikan sebagai untuk mengenali dan memahami peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berkembang, atau memiliki wawasan tentang kesempatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.

3. Kemauan

Kemauan adalah orongan atau faktor yang membangkitkan ketertarikan dan semangat seseorang untuk ikut berpartisipasi, misalnya keuntungan yang diperoleh dari keterlibatan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Nurbaiti (2017), meliputi:

1. Usia

Perbedaan usia dapat memengaruhi cara individu bersikap terhadap aktivitas sosial. Mereka yang berada dalam kelompok usia lebih tua cenderung menunjukkan komitmen moral yang lebih besar terhadap aturan dan norma sosial yang diterapkan, biasanya mereka lebih aktif berpartisipasi dibandingkan dengan individu dari kategori usia yang lebih muda.

2. Jenis Kelamin

Nilai-nilai sosial yang telah lama ada dalam masyarakat mempengaruhi kecenderungan perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Sistem sosial ini menciptakan perbedaan dalam status dan posisi, yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan hak dan kewajiban, termasuk tingkat partisipasi mereka.

3. Pekerjaan/Penghasilan

Penghasilan adalah hal yang erat kaitannya dengan jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang. Pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dengan

kata lain, partisipasi cenderung meningkat ketika didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil dan memadai.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berkaitan erat dengan pengetahuan yang dimilikinya, yang pada akhirnya memengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan memegang posisi yang sangat signifikan, karena melalui pendidikan membekali seseorang dengan kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif serta meningkatkan kepekaan terhadap berbagai isu, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Nurbaiti (2017), yaitu:

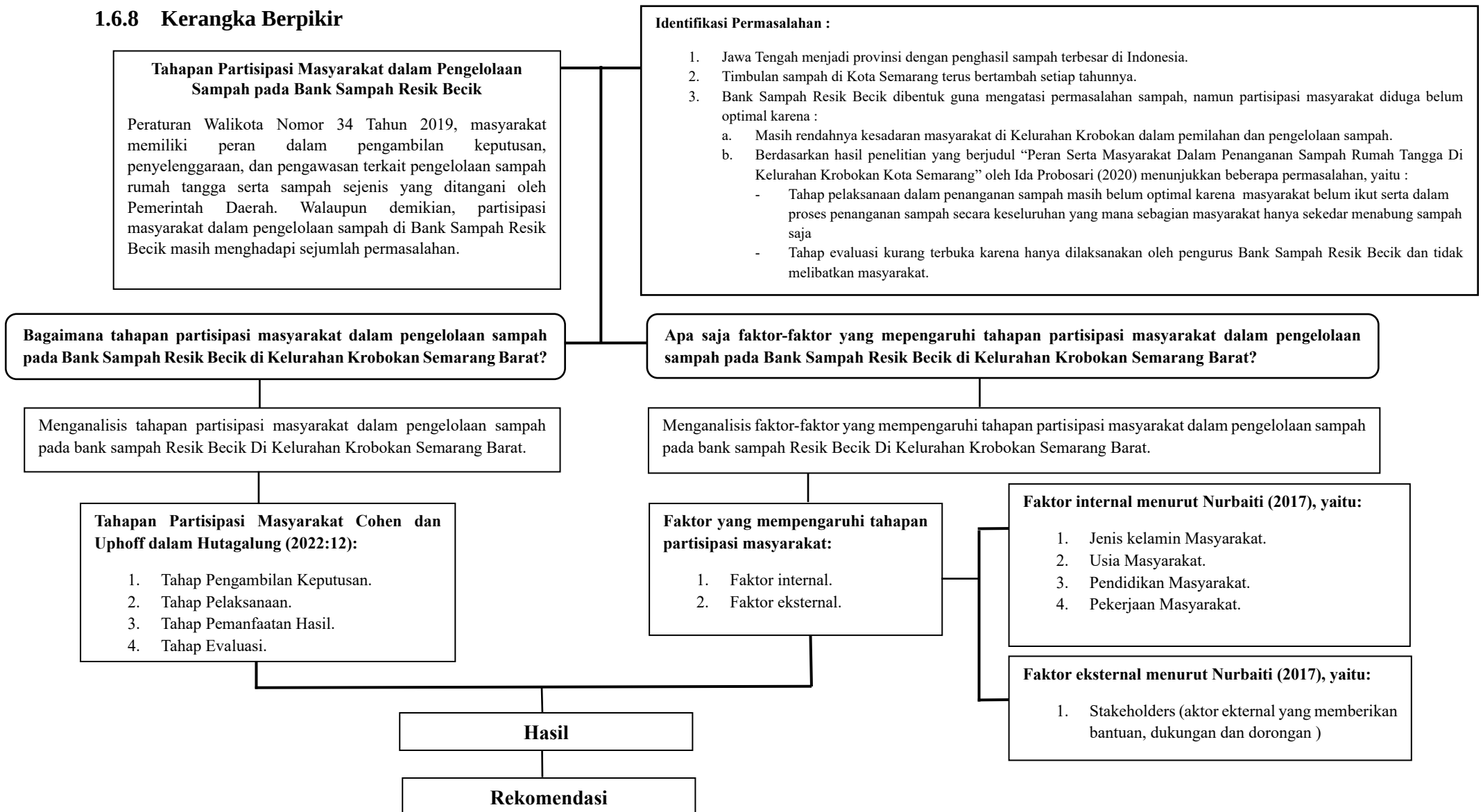
1. Stakeholder

Stakeholder terdiri dari berbagai yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan program, khususnya dalam mengelola partisipasi masyarakat. Pihak-pihak tersebut dapat mencakup pemerintah daerah, pengurus desa, tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO), serta pihak ketiga seperti LSM, yayasan sosial, dan institusi perguruan tinggi.

Penelitian ini mengadopsi teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff dalam Hutagalung (2022:12). untuk melakukan penelitian

tentang tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat. Teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami berbagai keterlibatan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Cohen dan Uphoff mengidentifikasi empat tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Dalam konteks penelitian mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik, teori Cohen dan Uphoff dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam setiap tahap pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah, sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik.

1.6.8 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini merupakan proses menjelaskan secara rinci dan konkret bagaimana indikator-indikator yang telah ditentukan oleh peneliti akan digunakan atau diukur untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam kata lain, operasionalisasi konsep adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengukur atau mewakili konsep yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan untuk membahas mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Resik Becik di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat, dengan memperhatikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi tersebut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Peneliti menganalisis fenomena yang berkaitan dengan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah berdasarkan gejala yang ada di lapangan. Teori Cohen dan Uphoff dalam Hutagalung (2022:12) membagi partisipasi masyarakat menjadi empat tahap, di antaranya:

1. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini gejala yang diamati berupa keikutsertaan masyarakat, seperti keikutsertaan dalam pembentukan program, kegiatan rapat atau musyawarah, sumbangan pemikiran/ide dan pemberian tanggapan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan gejala yang diamati berupa kontribusi masyarakat/kontribusi sumber daya (dana, fasilitas dan tenaga,) dan aksi masyarakat.

3. Tahapan Pemanfaatan Hasil

Pada tahap pemanfaatan hasil gejala yang diamati berupa manfaat material/sosial/pribadi.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi gejala yang diamati berupa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan umpan balik dalam bentuk kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dianalisis dengan merujuk pada gejala-gejala yang terlihat di lapangan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurbaiti (2017), antara lain sebagai berikut:

1. Faktor internal, gejala yang diamati berupa usia, jenis kelamin, pekerjaan/penghasilan dan pendidikan masyarakat.
2. Faktor eksternal, gejala yang diamati berupa bantuan, dukungan dan dorongan.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Resik	Tahap pengambilan Keputusan.	Keikutsertaan dalam proses pembentukan program bank sampah.
		Keikutsertaan dalam kegiatan rapat atau musyawarah.

Becik di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat.		Keikutsertaan dalam menyumbangkan pemikiran/ide.
		Keikutsertaan dalam memberikan tanggapan.
	Tahap pelaksanaan.	Kontribusi masyarakat dalam bentuk dana, tenaga dan fasilitas.
		Aksi masyarakat dalam pemilahan, pengumpulan, penimbangan, pencatatan, tabungan, pembagian hasil dan pendaurulangan sampah.
	Tahap pemanfaatan hasil.	Manfaat/keuntungan; Manfaat material/sosial/pribadi yang diperoleh.
	Tahap evaluasi.	Keterlibatan atau peran masyarakat dalam proses evaluasi serta umpan balik (berupa kritik dan saran) yang disampaikan masyarakat.
	Faktor internal.	Usia masyarakat.
		Jenis kelamin masyarakat.

		Pekerjaan/Penghasilan masyarakat.
		Pendidikan masyarakat.
	Faktor eksternal.	Bantuan yang diberikan DLH Kota Semarang dan Lazis Jateng untuk kegiatan pengelolaan sampah bank sampah.
		Dukungan yang diberikan DLH Kota Semarang dan Lazis Jateng untuk kegiatan pengelolaan sampah bank sampah.
		Dorongan yang diberikan DLH Kota Semarang dan Lazis Jateng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah bank sampah.

1.8 Argumen Penelitian

Pengelolaan sampah saat ini menjadi isu krusial dalam menghadapi permasalahan sampah yang semakin meningkat di Indonesia, terutama di Jawa Tengah yang merupakan provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki populasi terbesar di

provinsi tersebut. Banyaknya penduduk di Kota Semarang berpengaruh langsung terhadap volume sampah yang dihasilkan, sehingga kota ini menjadi salah satu penyumbang utama sampah di Provinsi Jawa sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pengelolaan sampah yang dapat dimulai dari skala kecil, seperti pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah sebagai bentuk pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Bank Sampah Resik Becik, yang berlokasi di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat, merupakan salah satu bank sampah di Kota Semarang. Namun, partisipasi masyarakat di Bank Sampah Resik Becik diduga masih rendah, yang disebabkan oleh minimnya kepedulian masyarakat di Kelurahan Krobokan terhadap kondisi lingkungan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, yang dikutip oleh Moleong (2009), tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini mencakup berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Pemakaian metode kualitatif adalah bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam untuk menguraikan data dengan lebih akurat melalui pendekatan deskriptif-analitis dan bermakna. Penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data, informasi, pendapat, keterangan, serta konsep tertentu yang dapat menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada lokasi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari objek yang diteliti. Peneliti memilih Kelurahan Krobokan sebagai lokasi penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya bank sampah Resik Becik yang berlokasi di Kelurahan Krobokan. Selain itu, lokasi ini dipilih berdasarkan fokus dan lokus tentang permasalahan penelitian, yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Resik Becik. Selain itu, lokasi ini juga dipilih sesuai dengan fokus dan konteks permasalahan penelitian, yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Resik Becik.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian ini, dilakukan berdasarkan tema penelitian yang berkaitan dengan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Resik Becik di Kelurahan Krobokan Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan. Menurut Sugiyono (2013) *purposive sampling* ialah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan studi kasus yang sedang diteliti serta tujuan penelitian. Subjek penelitian ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam isu tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Resik Becik. Adapun beberapa informan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Ika Yudha Kurniasari, S.KM	Ketua Bank Sampah
2.	Sri Hartati	Bendahara Bank Sampah
3.	Cece Trinawati	Masyarakat yang menjadi nasabah.
4.	Sri Handayani Wahyuningsih	Masyarakat yang menjadi nasabah.
5.	Eti Prihtinawati	Masyarakat yang menjadi nasabah.
6.	Tommy Indra Prasetya, SE	Pengelola informasi lingkungan, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan DLH.
7.	Imam Fauzi	Staff Program Lazis Jateng Cabang Layanan Semarang.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1.9.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Mulyana dalam Fiantika dkk (2022), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian dimana metode ilmiah digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Pendekatan ini melibatkan deskripsi data dan fakta secara komprehensif dengan menggunakan istilah-istilah yang relevan terhadap subjek yang sedang diteliti. Data deskriptif berupa teks naratif dan ungkapan

yang yang diambil dari wawancara dengan narasumber, serta hasil observasi terhadap lingkungan yang telah dianalisis akan dihasilkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh meliputi transkrip wawancara, gambar dan dokumen lain yang dapat memperkuat berbagai aspek dalam penelitian ini.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari ungkapan lisan, perilaku, dokumen, dan berbagai sumber lainnya. Pada penelitian ini, data diklasifikasikan menjadi dua kategori, di antaranya:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dikenal sebagai sumber data primer (Nugrahani, 2014:13). Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan cara mewawancarai orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik, yang berada di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat. Di samping itu, peneliti juga memperoleh data primer dengan melakukan observasi langsung di Bank Sampah Resik Becik sebagai lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang tidak diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, tetapi diperoleh dari berbagai karya yang telah dihasilkan oleh orang lain, seperti buku, dokumen, foto, dan data statistik (Nugrahani, 2014:13). Apabila sumber data primer tidak tersedia, data sekunder dapat digunakan dalam penelitian sebagai

tambahan atau bahkan sebagai sumber utama. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi dan sumber, termasuk peraturan atau regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah, data sampah yang diambil dari website KLHK serta penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan peneliti sebagai alat utama, dengan menerapkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

1. Observasi

Pencatatan dan pengamatan yang dilakukan secara terstruktur terhadap fenomena yang sedang diteliti dikenal sebagai observasi (Hasan et al., 2022:7). Ada dua jenis teknik observasi yang dapat digunakan, yaitu observasi partisipatif, dimana peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati untuk mengumpulkan data, dan observasi non-partisipatif, dimana peneliti melakukan observasi tanpa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik observasi non-partisipan secara terstruktur diterapkan oleh peneliti di lingkungan Kelurahan Krobokan, termasuk di Bank Sampah Resik Becik.

2. Wawancara

Menurut Zuriah dalam Fiantika dkk (2022), wawancara ialah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan dan tanya jawab dengan informan, di mana sejumlah pertanyaan diajukan untuk dijawab secara lisan. Peneliti menerapkan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa peneliti tidak menggunakan format pertanyaan baku, meskipun beberapa pertanyaan telah disiapkan sebagai panduan awal. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan subjek penelitian yang terkait dengan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan tentang kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Dokumen ini dapat berupa teks, karya, atau foto signifikan dari seseorang. Menurut Sugiyono (2012), penelitian yang didasarkan pada foto atau karya ilmiah serta seni yang sudah ada sebelumnya memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Dokumentasi penelitian ini menggunakan transkrip wawancara, foto-foto bersama informan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Resik Becik yang terletak di Kelurahan Krobokan, Semarang Barat.

1.9.7 Analisis dan Interpensi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berkonsentrasi pada proses yang terjadi di lokasi penelitian dan data pengumpulan data (Sugiyono dalam Barlian, 2016). Analisis data dilakukan dalam tiga Langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian dikenal sebagai reduksi data. Melalui proses ini, peneliti dapat memilih data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara untuk digunakan dalam proses analisis data berikutnya. Peneliti melakukan tindakan seperti merangkum atau menyusun informasi selama proses reduksi data. Data yang dipilih merupakan data yang relevan mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik.

b. Penyajian Data

Data disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, atau lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk membantu mempermudah pemahaman dengan mengorganisasi informasi dan menyusunnya dalam pola hubungan. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, penyajian data juga bisa berupa deskripsi singkat dan sebagainya. Pendekatan yang paling sering diterapkan adalah teks naratif, karena data disusun dengan sistematis, yang membuatnya lebih mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2018:249).

c. Penarikan Kesimpulan

Temuan baru yang belum pernah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya disebut kesimpulan penelitian kualitatif dapat. Penemuan ini dapat berupa gambaran atau deskripsi yang jelas tentang sesuatu yang sebelumnya kurang jelas atau samar. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif hanya dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada awal penelitian. Hal ini disebabkan oleh sifat sementara dari masalah dan rumusan masalah yang ada, yang dapat berubah seiring dengan berlangsungnya penelitian di lapangan. Selama proses tersebut, akan ada penemuan bukti tambahan yang mendukung jawaban terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018:134-135). Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang disajikan, yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Becik.

1.9.8 Kualitas Data

Salah satu tahap terakhir penelitian untuk mengetahui kebenaran data adalah kualitas data, yang digunakan melalui triangulasi. Triangulasi data sendiri diartikan sebagai metode untuk memverifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan pada waktu yang berbeda (Wijaya, 2018). Dalam penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk memastikan kualitas

data yang diperoleh. Triangulasi ialah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik guna memeriksa keabsahan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya. Ada tiga jenis triangulasi, yaitu sumber, waktu dan Teknik. Dalam penelitian ini, kualitas data ditentukan melalui penggunaan triangulasi sumber. Metode ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Resik Becik sangat penting untuk melakukan verifikasi data dari berbagai sumber informasi yang berbeda agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Untuk itu penelitian ini memerlukan informan yang beragam untuk memastikan data yang dihasilkan mencakup berbagai sudut pandang. Peneliti menggabungkan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memastikan kualitas dan kredibilitas data yang diperoleh terjamin.